

KEBERHASILAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA RETRIBUSI PARKIR DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA KUPANG

Yoan Lisbeth Viany Be'ni Rihi¹, Veronika Boleng Kelen²

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang^{1,2}

ABSTRAK

Dikirim (Agustus 25, 2025)
Direvisi (Januari 14, 2026)
Diterima (Januari 18, 2026)
Diterbitkan (Januari 19, 2026)

Corresponding Author
Yoan Lisbeth Viany Be'ni Rihi
Veronikakelen5@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan penerapan *collaborative governance* dalam tata kelola retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kota Kupang. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan retribusi parkir dipengaruhi oleh empat indikator utama. Pertama, dialog tatap muka berperan penting dalam memperkuat kerja sama antaraktor dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelayanan parkir. Kedua, pembangunan kepercayaan dilakukan melalui komitmen terhadap transparansi, keadilan, dan peningkatan kualitas pelayanan. Ketiga, komitmen terhadap proses menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pengelolaan parkir yang berkelanjutan. Keempat, adanya saling memahami antaraktor mendorong sistem pengelolaan parkir yang lebih responsif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Pengelolaan Parkir, Kolaborasi*

ABSTRACT

This study aims to analyze the success of collaborative governance in managing parking levy administration at the Department of Transportation of Kupang City. A qualitative research method was employed, using both primary and secondary data. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using descriptive qualitative analysis based on the collaborative governance theory proposed by Ansell and Gash. The findings indicate that the success of parking levy management is influenced by four main indicators. First, face-to-face dialogue plays a crucial role in strengthening collaboration among stakeholders and

improving efficiency and effectiveness in parking services. Second, trust-building is a continuous process that requires commitment to transparency, fairness, and service quality improvement. Third, commitment to the process is a core element in achieving effective and sustainable parking management. Fourth, mutual understanding among stakeholders contributes to a more responsive, efficient, and sustainable parking management system that enhances public welfare and stakeholder satisfaction.

Key Word: *Collaborative Governance, Parking Management, Collaboration*

PENDAHULUAN

Istilah *collaborative governance* merujuk pada suatu model tata kelola pemerintahan yang secara langsung melibatkan pihak-pihak di luar lingkup negara, dengan menekankan musyawarah dan konsensus dalam pengambilan keputusan kolektif. Tujuannya adalah untuk merumuskan maupun melaksanakan kebijakan publik serta program-program yang menyentuh kepentingan masyarakat (Ansell & Gash, 2008). Menurut Ansell dan Gash, *collaborative governance* merupakan pendekatan dalam proses pengambilan keputusan di mana para aktor yang terlibat saling berkolaborasi guna mencapai tujuan bersama, sekaligus berbagi tanggung jawab dan pemanfaatan sumber daya. Dalam praktiknya, bentuk tata kelola ini menekankan kemitraan antara lembaga pemerintah dengan aktor non-pemerintah dalam penyediaan layanan publik.

Fokus utama *collaborative governance* terletak pada pengelolaan kebijakan dan persoalan publik. Meskipun lembaga pemerintah memiliki peran dominan dalam proses perumusan kebijakan, tujuan dari kolaborasi adalah membangun konsensus di antara para pemangku kepentingan yang terlibat. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya terwujudnya keadilan sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan kawasan parkir, penerapan *collaborative governance* dapat memberikan berbagai keuntungan. Dengan melibatkan pihak-pihak seperti pemerintah, pengelola parkir, pengguna, maupun masyarakat, pengelolaan lahan parkir dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Kolaborasi tersebut juga memudahkan pertukaran informasi dan pemanfaatan sumber daya sehingga memungkinkan diterapkannya kebijakan parkir yang berkelanjutan, misalnya penyediaan fasilitas ramah lingkungan, pengurangan emisi kendaraan, serta dorongan penggunaan moda

transportasi alternatif. Selain itu, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya penggunaan ruang parkir yang bijak dan bertanggung jawab, sekaligus membantu menjelaskan kebijakan serta aturan yang berlaku.

Tarif parkir pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen penting untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang memanfaatkan fasilitas parkir. Penetapan retribusi atas layanan parkir di tepi jalan umum berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam ketentuan tersebut juga dijelaskan mengenai pengenaan pajak terhadap penyelenggaraan fasilitas parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan sebagai bagian dari kegiatan usaha utama maupun yang ditawarkan sebagai bentuk usaha tersendiri, termasuk penyediaan layanan penitipan kendaraan bermotor.

Kontribusi Parkir untuk PAD Kota Kupang tahun 2021-2023 memiliki kontribusi tertinggi pada tahun 2022 yaitu Parkir Khusus sebesar 112,35% dan Parkir umum sebesar 68,99%. Kontribusi parkir untuk PAD Kota Kupang terendah berdasarkan jenis parkir umum yaitu pada tahun 2021 sebesar 60,05% dan berdasarkan jenis parkir khusus sebesar 56,46%. Penetapan target penerimaan retribusi parkir harus dilakukan secara realistik artinya para tukang parkir harus menyertorkan hasil retribusi parkir sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan berita Pos Kupang pada tanggal 5 oktober 2024 di duga Ada permainan retribusi parkir di Kota Kupang. Praktik pengelolaan parkir selama ini syarat intervensi yang menyebakan target PAD dari sektor parkir tidak optimal. Selain itu, sistem pengumpulan retribusi yang kurang transparan juga bisa menjadi kendala, sebab dalam beberapa kasus, sistem pencatatan dan pelaporan retribusi parkir tidak akurat atau kurang transparan, sehingga memungkinkan adanya kecurangan atau laporan yang tidak sesuai. Rendahnya kepatuhan dari pihak pengelola parkir sendiri juga berperan, terutama jika mereka sengaja tidak memenuhi target demi keuntungan lebih, apalagi jika sanksi atau penegakan aturan kurang tegas. Kondisi ekonomi di lapangan juga dapat mempengaruhi pencapaian target, misalnya saat lokasi parkir mengalami penurunan pengunjung atau faktor eksternal lain yang mempengaruhi tingkat kunjungan, sehingga target yang ditetapkan menjadi kurang realistik. Penetapan target yang tidak sesuai dengan kondisi spesifik tiap lokasi juga bisa mempersulit pencapaian, misalnya jika target terlalu tinggi tanpa memperhitungkan tingkat kepadatan atau jumlah pengunjung di suatu tempat.

Masalah juru parkir yang menerima uang retribusi tanpa menyerahkan karcis terjadi karena beberapa penyebab. Pertama, kurangnya pengawasan dan kontrol yang ketat di lapangan membuat juru parkir merasa bisa beroperasi tanpa mengikuti prosedur resmi, termasuk penyerahan karcis. Kedua, minimnya sanksi tegas atau penegakan aturan atas pelanggaran ini dapat mendorong perilaku tidak sesuai prosedur. Selain itu, sistem insentif yang tidak memadai bagi juru parkir untuk mengikuti aturan mungkin mendorong mereka untuk mencari keuntungan tambahan dengan tidak menyerahkan karcis. Terakhir, kurangnya transparansi dan kesadaran akan pentingnya karcis sebagai bukti transaksi resmi bagi masyarakat juga berperan. Jika masyarakat tidak merasa perlu menuntut karcis, hal ini akan memperkuat perilaku juru parkir yang tidak menyerahkan karcis, sehingga mengakibatkan penerimaan retribusi sulit tercatat secara akurat.

Untuk mengatasi masalah ini, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT menawarkan beberapa solusi, antara lain melakukan identifikasi yang lebih rinci terhadap titik-titik parkir untuk menghindari parkir liar, penetapan target yang lebih realistik berdasarkan survei lapangan, dan kerja sama yang lebih erat dengan badan usaha seperti Pelindo dan Hypermart. Pengelolaan parkir dalam collaborative governance dapat diterapkan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, pemilik lahan parkir, operator parkir, dan masyarakat.

Melalui kolaborasi ini, tujuan pengelolaan parkir yang lebih efektif dan efisien dapat dicapai. Salah satu adalah implementasi collaborative governance dalam pengelolaan parkir melalui kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam menyediakan fasilitas parkir yang memadai. Kerjasama dalam pemerintah daerah dapat memberikan izin atau kontrak kepada pihak swasta untuk mengelola lahan parkir, sementara pihak swasta bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas parkir yang baik dan memungut retribusi parkir yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keuntungan dari penerapan collaborative governance dalam pengelolaan parkir antara lain adalah peningkatan kualitas pelayanan parkir, pengelolaan yang lebih efisien, dan peningkatan pendapatan daerah melalui retribusi parkir yang lebih teratur dan transparan (Henriyani 2023).

TINJAUAN PUSTAKA

Ansell dan Gash (2008) mengemukakan bahwa terdapat sejumlah faktor utama yang memengaruhi keberhasilan *collaborative governance* yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, di antaranya:

1. Dialog Tatap Muka (*Face-to-face dialogue*)

Pada tahap awal, interaksi langsung antar pemangku kepentingan sangat penting untuk menumbuhkan rasa saling percaya, penghargaan, pemahaman bersama, serta komitmen terhadap proses kolaborasi yang dirancang dan dijalankan (Ansell & Gash, 2007:558). Tanpa adanya komunikasi tatap muka sejak awal, potensi munculnya konflik dalam perjalanan kolaborasi akan semakin besar.

2. Membangun Kepercayaan (*Trust building*)

Kepercayaan menjadi fondasi utama dalam kolaborasi. Proses kolaborasi tidak hanya sebatas negosiasi, tetapi juga menuntut adanya keyakinan antar pihak yang terlibat. Kepercayaan ini tidak terbentuk secara instan, melainkan memerlukan waktu, dan akan sangat berperan penting bagi keberlanjutan kerja sama jangka panjang.

3. Komitmen terhadap Proses (*Commitment to the process*)

Komitmen berarti keyakinan bahwa dialog dan perundingan merupakan jalan terbaik dalam merumuskan kebijakan untuk menyelesaikan persoalan bersama. Dalam praktiknya, komitmen membutuhkan 1 iya mekanisme yang transparan, adil, dan jelas bagi semua aktor yang terlibat.

4. Pemahaman Bersama (*Shared understanding*)

Pada titik tertentu, para pemangku kepentingan perlu membangun kesepahaman mengenai tujuan kolektif yang ingin dicapai. Pemahaman bersama dapat diartikan sebagai upaya menyelaraskan pengetahuan dan sudut pandang yang diperlukan untuk menghadapi dan menyelesaikan suatu permasalahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh sebuah data yang akurat mengenai Sistem Pengelolaan Pelayanan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang (Studi Kasus Pada). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara: dilakukan dengan kepala dinas perhubungan, kepala bidang parkir, petugas parkir, masyarakat pengguna parkir, pemilik toko/usaha dan koordinator parkir; observasi: mengamati aktivitas parkir di ruas Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kuanino dan Kelurahan Nunleu Kecamatan Kota Raja dan beberapa toko usaha di sekitarnya; dokumentasi mengumpulkan data sekunder dari laporan dinas dan dokumen terkait. Analisis data dilakukan dengan metode triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis sistem pengelolaan parkir di ruas jalan jenderal sudirman kelurahan kuanino dan kelurahan nunleu kecamatan kota raja dan beberapa toko usaha yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang ditemukan beberapa temuan yang relevan dengan teori *Collaborative Governance* Ansel dan Gash (2008). Hasil dan pembahasan berikut disusun berdasarkan empat (4) indikator utama dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses dan saling memahami.

1. Dialog Tatap Muka

Keberadaan dialog tatap muka menjadi sarana untuk memperkuat legitimasi kebijakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurut O'Doherty (2012), partisipasi aktif melalui dialog langsung dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pengelolaan layanan publik. Dalam wawancara, Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang menyatakan bahwa forum diskusi rutin mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, dialog ini juga dapat menjadi forum untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan parkir yang baik dan aturan yang berlaku. Dengan begitu, proses ini tidak hanya sebatas komunikasi, tetapi juga sebagai pendidikan dan pembinaan masyarakat. Oleh karena itu, indikator dialog tatap muka harus menjadi bagian integral dari strategi kolaboratif yang berkelanjutan dan adaptif. Keberhasilannya akan tercermin dari meningkatnya partisipasi aktif dan kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Namun demikian, tantangan dalam implementasi dialog tatap muka adalah terkait keterbatasan waktu, sumber daya, dan kesiapan semua pihak untuk berpartisipasi secara aktif. Menurut Ansell dan Gash (2008), tidak semua forum diskusi berjalan efektif jika tidak didukung oleh fasilitator yang kompeten dan kebijakan yang mendukung. Wawancara di Kupang menunjukkan bahwa meskipun forum diskusi rutin dilakukan, masih terdapat kelompok masyarakat yang kurang terlibat karena keterbatasan pengetahuan, waktu, atau ketidakpercayaan. Oleh karena itu, perlu adanya strategi untuk meningkatkan partisipasi, seperti penyuluhan, sosialisasi, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penggunaan teknologi digital juga dapat memperluas jangkauan dialog dan mempercepat proses komunikasi. Dengan demikian, keberhasilan indikator ini sangat bergantung pada upaya proaktif untuk mengatasi hambatan dan memastikan semua pihak merasa dilibatkan dan dihargai dalam proses dialog.

Penggunaan pendekatan dialog tatap muka dalam konteks pengelolaan parkir di

Kota Kupang secara keseluruhan mendukung penerapan prinsip-prinsip *collaborative governance*. Penguatan kapasitas dialog ini akan menghasilkan pengelolaan parkir yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua pihak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dialog tatap muka merupakan alat penting yang dapat memperkuat kerjasama semua pihak dalam mencari solusi terbaik. Hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap efisiensi, efektivitas dan kesejahteraan masyarakat dalam bertransaksi parkir. Dengan demikian, dialog tatap muka harus dipertahankan dan ditingkatkan untuk mencapai pengelolaan parkir yang lebih optimal di masa yang akan datang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dialog tatap muka merupakan alat penting yang dapat memperkuat kerjasama semua pihak dalam mencari solusi terbaik. Hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap efisiensi, efektivitas dan kesejahteraan masyarakat dalam bertransaksi parkir. Dengan demikian, dialog tatap muka harus dipertahankan dan ditingkatkan untuk mencapai pengelolaan parkir yang lebih optimal di masa yang akan datang.

2. Membangun Kepercayaan

Kepercayaan juga perlu dipupuk melalui komunikasi yang berkelanjutan dan upaya memperbaiki kekurangan yang ada. Menurut teori, kepercayaan merupakan proses yang dinamis dan memerlukan perhatian terus-menerus. Wawancara di Kupang memperlihatkan bahwa kebijakan yang konsisten dan responsif terhadap keluhan masyarakat sangat berpengaruh dalam menjaga kepercayaan. Kepala Dinas Perhubungan menegaskan bahwa kepercayaan ini harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh diabaikan. Ketika masyarakat percaya bahwa sistem berjalan jujur dan adil, mereka akan lebih bersedia mendukung program dan kebijakan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, indikator membangun kepercayaan harus terus diupayakan dan diukur secara objektif melalui survei dan feedback masyarakat. Keberhasilan indikator ini akan menjadi fondasi utama dalam memperkuat kolaborasi dan tata kelola yang baik.

Dalam konteks pengelolaan parkir, kepercayaan publik sangat dipengaruhi oleh keadilan dalam penetapan tarif dan kualitas pelayanan. Pengaturan tarif yang adil dan transparan menciptakan rasa keadilan di antara pengguna jasa parkir. Keterbukaan data-data terkait penggunaan tempat parkir dan setoran dari petugas parkir akan memperkuat transparansi sistem. Pelayanan yang berkualitas tinggi juga menumbuhkan kepercayaan. Ini berarti bahwa petugas parkir harus bertindak profesional, ramah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kinerja pelayanan

yang memuaskan menjadi salah satu faktor penting untuk membangun kepercayaan.

3. Komitmen terhadap Proses

Komitmen terhadap proses pengelolaan parkir membutuhkan dukungan konsisten dari pemerintah. Kebijakan dan regulasi yang jelas serta penegakan aturan yang konsisten menjadi fondasi utama bagi komitmen semua pihak. Hal ini menciptakan rasa aman dan keyakinan bahwa sistem parkir dijalankan secara adil dan transparan. Komitmen yang kuat dari pemerintah menjadi acuan dan landasan penting bagi komitmen *stakeholders* lainnya. Pengelolaan parkir yang baik memiliki tujuan jangka panjang. Dukungan pemerintah yang konsisten merupakan bagian dari faktor pendukung Initial Conditions dan Facilitative Leadership dalam model Ansell dan Gash (2008).

Komitmen terhadap proses dalam pengelolaan parkir di Kota Kupang merupakan inti dari penerapan *collaborative governance*. Hal ini memerlukan komitmen bersama dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan adanya komitmen yang kuat, pengelolaan parkir akan lebih efektif dan berkelanjutan, meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi dalam penggunaan fasilitas parkir. Komitmen ini memastikan keberlanjutan dalam pengelolaan parkir Kota Kupang untuk jangka panjang. Ini mencerminkan bahwa komitmen adalah faktor kunci yang memungkinkan tercapainya hasil kolaborasi (outcomes) dalam model Ansell dan Gash (2008).

4. Indikator Saling Memahami

Saling memahami dalam collaborative governance dapat diartikan sebagai kemampuan para pemangku kepentingan untuk menginternalisasi perspektif, kebutuhan, dan kekhawatiran pihak lain, meskipun mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Menurut Gray (1989), "saling memahami adalah proses di mana para pihak yang berbeda dapat membangun makna bersama tentang masalah dan potensi solusinya." Saling memahami diwujudkan melalui interaksi yang aktif dan konstruktif di antara *stakeholder*. Keterbukaan komunikasi menjadi sangat penting dalam hal ini. Saling memahami tidak hanya berlaku antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga di antara petugas parkir dengan pemilik usaha dan masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan parkir, saling memahami tercermin dari kemampuan untuk mendengar dan mempertimbangkan perspektif masing-masing *stakeholder*. Menghargai perbedaan pendapat dan keinginan menjadi langkah penting dalam proses

ini. Hal ini mendorong pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan berwawasan luas, serta menghindari terjadinya kesalahpahaman dan konflik. Menghormati setiap individu sebagai bagian dari proses sangat penting. Sinergi yang terbentuk akan menghasilkan solusi yang komprehensif.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan Collaborative Governance dalam tata kelola retribusi parkir di Kota Kupang memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan parkir. Indikator utama seperti dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan saling memahami menjadi faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi antara pemerintah, pengelola parkir, masyarakat, dan pemilik usaha. Meskipun telah ada upaya komunikasi dan partisipasi, tantangan seperti kurangnya pengawasan, transparansi yang belum optimal, serta rendahnya kesadaran beberapa stakeholder perlu ditangani secara serius. Penguatan komunikasi terbuka, peningkatan kepercayaan melalui transparansi, serta komitmen bersama dari semua pihak menjadi fondasi penting untuk mencapai tata kelola parkir yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Theory, Journal of Public Administration Research And*, 18(4), 543–571.
- Ardiansyah, F. W., Purnaweni, H., & ... (2023). Analisis Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang Kecamatan Purwodadi *Journal of Public Policy* [https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/39942%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/39942/29336](https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/39942)
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif geografi. *Collaborative Govenance Dalam Perspektif Publik*, 161.
- Bachtiar, N., Tamrin, S. H., Pauzi, R., Prilasandi, A. D., & Rafliansyah, M. (2022). Collaborative Process Dalam Pengelolaan Desa Wisata. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(3), 340–364. <https://doi.org/10.33509/jan.v28i3.1723>
- Handayani, R. (2020). Metode Penelitian Sosial. In *Bandung* (Issue September).

Haryono, D., & Fisetaria. (2023). Strategi Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Palu (Studi Kasus Pasar Masomba). *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Tadulako*, 1(1), 51–69. <https://jimat.org>

Henriyani, E., Galuh, U., Koperasi, D., & Parkir, P. (2023). *Kolaborasi institusi dalam penertiban parkir tepi jalan di kabupaten ciamis*. 652–661. <http://repository.unigal.ac.id/handle/123456789/3950%0Ahttp://repository.uniga l.ac.id/bitstream/handle/123456789/3950/Heryanto 652-661.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Kurniawan, B., & Nurvianty, M. (2022). Collaborative Governance Dalam Penataan Kawasan Kuliner (Studi pada Penataan Kawasan Kuliner di Pasar Lama Kota Tangerang). *Jurnal MoZaiK*, 1, 58–73. <https://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/view/2055%0Ahttps://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/download/2055/683>

O'Leary, R., & Bingham, L. B. (2009). The promise and practice of collaborative governance in the United States. *Urban Affairs Review*, 44(2), 309–337.

Surya, I., Nofrima, S., Saputra, H. A., & Nurmiyati, N. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Berkelanjutan Di Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus: Wisata Kebun Teh Nglinggo). *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(2), 190. <https://doi.org/10.29300/imr.v6i2.2605>

Dinas Perhubungan Kota Kupang. (n.d.). *Profil dan Program Kerja Dinas Perhubungan Kota Kupang*. Diakses dari <https://dishub.kupangkota.go.id>

Dinas Perhubungan Kota Kupang. (2023). *Data Retribusi Parkir dan Rekayasa Lalu Lintas*. Kupang: Bidang Rekayasa, Dinas Perhubungan Kota Kupang.

Pemerintah Kota Kupang. (2025). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kupang Tahun 2025*. Kupang: Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Kupang. Diakses dari <https://dishub.kupangkota.go.id/rkpd2025>